

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI KABUPATEN MAJENE (Studi Kasus Tahun 2012-2014)



**Oleh
SAMIR
NIM B 111 11 396**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK
DI KABUPATEN MAJENE
(Studi Kasus Tahun 2012-2014)

OLEH:
SAMIR
B 111 11 396

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Studi
Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK
DI KABUPATEN MAJENE
(Studi Kasus Tahun 2012-2014)**

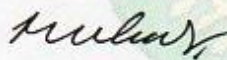
DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

**SAMIR
B 111 11 396**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 06 Maret 2015
Dan Dinyatakan Diterima

PANITIA UJIAN

KETUA



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

SEKRETARIS



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

**A.n Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Mahasiswa :

Nama : SAMIR -
Nomor Induk : B 111 11 396
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK DI KABUPATEN MAJENE
(Studi Kasus Tahun 2012-2014)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 20 Februari 2015

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS
NIP: 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.
NIP: 19631024 198903 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

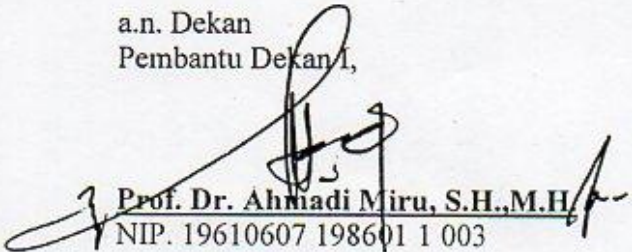
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **SAMIR**
No. Pokok : B111 11 396
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan
Anak di Kabupaten Majene
(Studi Kasus Tahun 2012-2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

SAMIR (B 111 11 396). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014). Dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing II.

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene Wilayah Polres Majene. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian teknik wawancara, pengumpulan data dan observasi, data yang diperoleh di kumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan di Kabupaten Majene yaitu: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku. (2). Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan di Kabupaten Majene yaitu: memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA mengenai dampak negatif bahaya seks bebas, Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari di taman Kota yang merupakan tempat Anak dan Remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan kejahatan pemerkosaan, serta menindak dan menuntut pelaku kejahatan pemerkosaan Anak dengan ancaman hukuman yang berat sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Tak lupa penulis haturkan banyak terima kasih dan sembah sujud kepada orang tua penulis ayahanda **H.Hamza** dan kepada ibunda **Hj.Nurnina** yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan mengiringi setiap langkah dengan restunya yang tulus serta segala pengertian yang mereka berikan dalam proses menempuh pendidikan sampai pada penyusunan skripsi ini.

Selama penulisan ini banyak hambatan yang penulis hadapi, namun atas bantuan dan bimbingan semua itu bisa teratasi. Untuk itu penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS** selaku pembimbing pertama dan **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.**, selaku pembimbing kedua yang penuh keikhlasan meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bapak/ibu penguji **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.Si., Haeranah, S.H., M.H. , dan Nur Azisa, S.H., M.H.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis haturkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Kepada Pimpinan Fakultas Hukum Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan Satu (WD 1), Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., selaku (WD II), dan Dr, Hamzah Halim, S.H., M.H.,selaku (WD III).
4. Bapak/ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahan serta limpahan ilmunya yang tak ternilai.
5. Seluruh pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepada Kepala Kepolisian Majene (Polres Majene) dan beserta para jajaranya yang sudah membantu penulis selama penelitian.
7. Teman-Teman Alumni SMAN 1 Mangkutana, Kab. Luwu Timur Angkatan 2010 (Suryadi, Resky Amalia Hamka, Ulfa Utami Mappe, Musfira, Herawati Hasan, Muh.Ardi Sunarto, Naharuddin, Sinta Septiana Rasa, Rifka Tappi, Fatwa Nugraha, Abd. Rahman, Dwi Irmawati).
8. Teman –teman KKN Reguler Angkatan 87 Kecamatan Suppa Kab. Pinrang terkhusus pada (Dio, Dilla, Imhe, Kartika, Angga, Erik, Afdal, Aye dan Wasti)
9. Seluruh teman-teman Mediasi angkatan 2011
10. Terima kasih yang terkhusus buat Andi B. Anindhita, Raden Suryadi, Dian Cahya Sari, Athifa Ramadhani, Ika Mustika Paturusi, Iin Nur Indah Sahib, Riady Jufri, Rian Pratama, Dewi Sartika Tenri Ajeng, Rahma Syarif, Rima Islami, Muh. Faizal Tanjung, Irfan Umar, uccang, Emi Nurmay Rahayu, A. Abriani, Hardianti, Retno Annisa, Diawan

Cahyawan, Fauzi Malinta, Fatimah, Muh.Angga Wiliantara, Reski Dian
Utami Putri Bustam,Fitriani Irianti Jalaluddin, Wahyuni Zakaria, Nur
Alimah Zainuddin, Nurul Hikmah, Nadia Ananda Elsanti, A. Atika

Tak lupa penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak apabila selama mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir terdapat
kesalahan-kesalahan yang tidak berkenaan di hati baik disengaja maupun tidak
disengaja.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat
penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga segala usaha dan
kegiatan selama ini yang kita jalani bermanfaat dan mendapat berkah dan ridho-
Nya.

Amin....

Makassar, 9 Februari 2015

Penulis

Samir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENUJU UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	7
1. Definisi Kriminologi	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi	11
3. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan	12
4. Teori upaya penanggulangan Kejahatan	18
B. Pengertian Kejahatan dan Tindak Pidana.....	21
1. Definisi kejahatan.....	21
2. Definisi Tindak Pidana.....	23
C. Tindak Pidana Pemerkosaan	25
1. Pengertian Pemerkosaan	25

2. Unsur-Unsur Pemerkosaan.....	28
D. Jenis Pemerkosaan.....	33
E. Karakteristik Perkosaan.....	35
F. Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan	37
G. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Data Perkembangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014	47
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene wilayah Hukum Polres Majene	54
C. Upaya Penanggulangan kejahatan Pemerkosaan Anak Kabupaten Majene.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.¹ Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antar individu satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang pihak lain.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary need*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.²

Untuk mewujudkan masyarakat damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan

¹Teguh Prasetyo, 2013. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

²Soerjono Soekanto, 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67.

masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum.³

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan pada anak. Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah, mengatakan:⁴

“Pemukosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “ fear of crime” (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap perempuan. Korban pemerkosaan anak, yang notabene secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya.

Sangat sedikit kasus perkosaan terhadap anak yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut. Sebagian besar

³Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2007. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 209.

⁴Mulyana W. Kusumah, 1988. *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Hal. 47.

kasus-kasus tersebut diketahui berasal dari laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut atau cerita polos dari anak-anak yang bersangkutan mengenai peristiwa yang dialaminya tanpa disadarinya, bahwa dia telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Selain itu, pemerkosaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana pemerkosaan ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kasus pemerkosaan terhadap anak modus operandinya beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku pemerkosaan dengan hukuman seberat-beratnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan Pasal (285) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa:⁵

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan Pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.

Kemudian dalam aspek Perlindungan Anak Arif Gosita, mengatakan:⁶

Bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

⁶Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 33.

dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁷

Pasal 1 angka 2 UU No.23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.⁹

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara, bahkan pelakunya merupakan dari oknum Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kejahatan kekerasan, perbuatan asusila dan pemerkosaan terhadap Anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi di daerahpun

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 34.

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

kejahatan pemerkosaan sudah meresahkan masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Majene jumlah kejahatan kekerasan, pemerkosaan Anak cukup tinggi menurut data yang penulis peroleh dari Polres Majene dari Tahun 2012-2014 terdapat 32 kasus yang terjadi yang melibatkan Anak baik sebagai korban dan juga sebagai pelaku dan terdapat 10 kasus pemerkosaan Anak.

Pada tanggal 27 Agustus 2014 terdapat kasus tindak pidana pemerkosaan Anak yang terjadi di Kabupaten Majene dimana pelaku merupakan Oknum Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi mengatakan: “Pemeriksaan terhadap dua orang gadis remaja yakni Riawati (15) dan Sarmina (15), Rabu 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita. Kronologi peristiwa tersebut berawal saat kedua korban tersebut dipergoki sementara berpacaran oleh dua anggota Satpol PP tersebut yakni Sudirman (28) dan Wasman (24), yang sementara berpatroli. Kemudian, korban dibawa kepenjagaan kantor Bupati dan diamankan di ruang pola tersebut, kemudian korban diperkosa oleh tersangka hingga hampir nyaris pingsan.”¹⁰

Salah satu pokok permasalahan yang menjadi hemat penulis dalam penulisan proposal ini adalah mengenai tindak pidana pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang hendak dipecahkan adalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene?

¹⁰ Tribun Timur, 28 Agustus 2014, hlm. 2

2. Bagaimana upaya penanggulangan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak di kabupaten Majene
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya aparat kepolisian terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di kabupaten Majene

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kewaspadaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi anak dari kejahatan kesusilaan dan pemerkosaan yang dapat merusak masa depan anak baik secara fisik maupun psikis.
- b. Menjadi masukan dan memberi informasi kepada masyarakat sejauh mana aparat penegak hukum memproses perbuatan pidana tersebut sesuai hukum yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard* (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹¹

Edwin H. Sutherland mengemukakan definisi kriminologi bahwa:¹²

“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as sosial phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).”

Menurut Sutherland, W. A. Bonger (1934) mengatakan bahwa Kriminologi adalah:¹³

“Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, pemerkosaan, dan alkoholisme)”.

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi 5 (lima) cabang, yakni:

1) Criminal Antropology

Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatos*), dan ilmu ini memberikan jawaban suatu jawaban atas pertanyaan tentang

¹¹A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Refleksi. Makassar, hlm. 1.

¹²*Ibid*, hlm. 1.

¹³Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung, hlm. 7.

orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.

2) Criminal Sociology

Ilmu pengetahuan tentang Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Criminal Psychology

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

5) Penologi

Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Disamping itu terbagi lima bagian cabang Kriminologi, ia juga mengatakan bahwa ada “ Kriminologi Terapan” dalam bentuknya dibagi menjadi 3 bagian:¹⁴

a) Higiene Kriminal

Yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

b) Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.

c) Kriminalistik (Police Scientific)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Herman Mannheim dalam bukunya, *Comparative Criminology* (1965), membedakan kriminologi di fokuskan pada mempelajari kejahatan, dan kriminologi dalam arti luas, difokuskan pada kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan masalah kejahatan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punit.¹⁵

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁶

Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:¹⁷

- 1) Sosiologi hukum :kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi.

¹⁵*Ibid*, hlm. 9

¹⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹⁷*Ibid*, hlm. 11.

- 2) Etiologi kejahatan :merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
- 3) Penology :ilmu tentang hukuman.

Nagel dalam bukunya yang berjudul "*Critical Criminology*", mengatakan bahwa definisi Kriminology setelah Perang Dunia II semakin meluas, yakni tidak hanya semata-mata melihat dunia kriminologi dari sisi etiologi kejahatan semata. Sebagai contoh, Viktimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950, yakni bertitik tolak dari pemikiran bahwa kriminologi tidak dapat lagi dipraktikkan tanpa memperhitungkan hubungan (interaksi) antara penjahat dan orang-orang menjadi sasaran kejahatan baik yang merupakan korban personal atau impersonal, maka dengan demikian Sosiologi Hukum pidana memperluas bidang ini.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas ditarik suatu pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang mencakup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.

Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu social, akan tetapi kriminologi tidak dapat dipisahkan dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang.

¹⁸Yesmil Anwar Adang, *op.cit.*, Hlm. 10.

Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (*motif*) dan kategori pelaku kejahatan (*Tipe-tipe Penjahat*). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Edwin Sutherland menambahkan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, ekonomi, biologi, kimia, statistik, dan banyak lainnya.¹⁹

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, maka ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan *represif* tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*kriminal prevention*).

Pokok bahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

1. Definisi kejahatan;

¹⁹A. S. Alam, *op.cit.*, Hlm. 3.

2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan dan;
5. Statistik kejahatan.

Pokok bahasan dalam etiologi (breaking laws) adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
- b. Teori-teori kriminologi; dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi.

Pokok bahasan dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) antara lain:

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.
3. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Kriminologi seperti banyak ilmu pengetahuan sosial lainnya lahir dalam abad ke-19 (1830) namun jauh sebelum lahirnya kriminologi sudah banyak pendapat dari para pakar tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan yang merupakan fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman-zaman, yakni sebagai berikut :

- a. Zaman Kuno

Pada masa ini dikenal pendapat-pendapat dari Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322) yang pada dasarnya menyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan ialah semakin tinggi penghargaan manusia

atas kekayaan makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan, demikian pula sebaliknya kemiskinan dapat mendorong manusia yang menderita kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

b. Zaman Abad Pertengahan

Menurut Von Aquino (1226-1274) menyatakan bahwa :

“Orang-orang kaya yang hidup hanya berfoya-foya bila jatuh miskin mudah untuk mencuri”.

c. Permulaan Zaman Baru

Banyak dikemukakan pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan karena kemiskinan dan sebab-sebab sosial lainnya, juga masa ini dikenal sebagai masa penentangan terhadap hukuman yang terlalu kejam pada masa itu tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria, dan lain-lain.

d. Masa sesudah Revolusi Perancis

Sampai pada tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi, dan psikologi.

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis menurut A. S. Alam yaitu²⁰ :

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E. H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Sutherland menggunakan istilah *Differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutny,

²⁰ *Ibid*, hlm. 45.

mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfavorable to violation of law*”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

2. Teori Anomie

Menurut Robert K, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) *Cultural as piration* atau *culture goals* yang di yakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar merekan akan melakukan kejahatan, disparitas antar tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu,

pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain : struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

- a. Adanya reaksi terhadap *labeling* dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : penjahat.
- b. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
- c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.

Menurut A. S. Alam teori Penyebab Kejahatan Dari perspektif lain yaitu:²¹

1. Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori *labeling* adalah :

- a. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda

²¹ *Ibid*, Hlm. 67.

memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

b. Howard, berpendapat bahwa teori *labeling* dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu :

- 1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
- 2) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan pertama dari *labeling* adalah memberikan label/cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. *Labeling* dalam arti ini adalah *labeling* sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

Persoalan *labeling* kedua (efek *labeling*) adalah bagaimana *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena cap/label. Persoalan ini memperlakukan *labeling* sebagai variabel yang *independent* atau variabel bebas. Dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya kemudian seterusnya label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label itu diberikan oleh si pengamat, bahwa dirinya memang jahat.

2. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi

manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari consensus masyarakat (*communal consensus*)²²

Menurut model consensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan. Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

3. Teori Radikal (Kriminologi Kritis)

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang menentang teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis.

Menurut Richard Quinney kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya Negara sosialis²³.

Menurut William Chamblis, ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir dibawah ini :

²² *Ibid*, hlm.71.

²³ *Ibid*, hlm.74

- a. Dengan di industrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
- b. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
- c. Masyarakat sosialis akan memilih tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

Melalui pemahaman teori-teori tersebut diatas, baik refleksi kejahatan model consensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya. Pemahaman ini akan bermanfaat bagi pemilihan perspektif kriminologi yang tepat bagi kebijakan criminal dan kebijakan sosial di Indonesia.

4. Teori upaya penanggulangan Kejahatan

Penggunaan upaya "*penal*" (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan ("*policy*"). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan diatas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi "*penal*" seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana *penal* tidak selalu harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif.

Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai "*the prevention of crime and the treatment of offenders*", yaitu :

1. pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai suatu masalah yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogjanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan yang luas dan menyeluruh.
2. pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*)
3. penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosiokultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia internasional baru.

Berdasarkan pernyataan dalam kongres PBB di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan

dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Menurut Prof. A. S. Alam Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu²⁴ :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif factor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalui terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor **Niat** tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam

²⁴ *Ibid*, hlm.79.

upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Pengertian Kejahatan dan Tindak Pidana

1. Definisi Kejahatan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, kejahatan merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia. Sejalan dengan ini, Frank Tannembaum menyatakan bahwa “crime is eternal -as eternal as society” artinya, dimana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.²⁵

Hal ini menunjukkan, bahwa kejahatan terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain dari darsi eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Ada suatu problem seperti misalnya desakan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

²⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26.

Menurut Gerson W. Bawengan, ada 3 pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:²⁶

a) Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b) Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasi arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

c) Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut Kejahatan.

Pendapat Bawengan itupun memandang kejahatan tidak semata-mata dari sudut hukum, tetapi juga dari sudut keagamaan dan religius. Dari sudut keagamaan, kejahatan diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang melanggar norma-norma, diantaranya norma agama, sedangkan dari sudut religius, kejahatan disebutnya sebagai perbuatan dosa pada Tuhan yang akan mendapatkan siksa dikemudian hari.

²⁶*Ibid*, hlm. 27.

Bagi Hari Saherodji, kejahatan diartikan sebagai berikut:²⁷

- 1) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- 2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- 3) Perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dihukum oleh negara.

Pendapat Hari Saherodji itu mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial dan ditentukan secara hukum sebagai kejahatan. Ada unsur kesengajaan yang dimunculkan dan kerugian yang ditimbulkan, sedang disatu sisi harus pula ada perundang-undangan yang menentukannya.

Dalam ajaran Islam juga digariskan, bahwa ada berbagai macam bentuk perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Suatu bentuk perbuatan yang disengaja atau direncanakan (bukan karena kealpaan/kelalaian) yang mengakibatkan kerugian bagi sesama manusia juga dapat disebut kejahatan.

2. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan.²⁸ Delik dalam bahasa Belanda yang disebut dengan *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan

²⁷ *Ibid*, hlm. 28.

²⁸ Mustafa Bola, Judhariksawan, *Pedoman Perkara Hukum* (Makassar : fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004), hlm. 17.

sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.²⁹ Selanjutnya Van Hamel menguraikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wetjen*).³⁰

Berbagai istilah yang digunakan oleh para pakar tersebut, tidak mengikat sepanjang tidak mengubah makna *strafbaarfeit*. Hal ini dikarenakan maksud dari istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah untuk mengalihkan ke tata bahasa Indonesia yang baku dan memiliki konsep yang jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pemakaiannya.

²⁹Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224

³⁰Ibid, hlm 225

C. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku (Depdikbud, 1989:673)³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).³²

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana

³¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op.,cit*, hlm. 40.

³² *Ibid*, hlm. 40.

diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.³³

Sedangkan definisi perkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan”³⁴

Dari beberapa pendapat diatas diketahui bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan isterinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.

Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

³³*Ibid*, hlm. 41.

³⁴*ibid*, hlm. 41.

Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (laki-laki).

Pembuat undang-undang menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, oleh karena bukanlah semata-mata paksaan itu oleh perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Hal ini sebaliknya terjadi pada seorang perempuan, dimana akibat persetubuhan dapat berakibat kehamilan terhadap perempuan tersebut.

Selain diatur dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana tersebut diatur juga dalam Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa:

“barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Selanjutnya pada Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Bertolak dari Pasal 286 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang disetubuhi berada di luar perkawinan dan diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Mengenai pengertian pingsan atau tidak berdaya menurut Soesilo adalah:

“pingsan artinya tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”.

2. Unsur-Unsur Pemerkosaan

Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP diatas adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
- c. Memaksa
- d. Seorang wanita
- e. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan inpoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barangsiapa yang di maksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar pasal 285 KUHP.

2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

³⁵Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 108

Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah:³⁶

Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-alibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan.

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat *misalnya* menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya. oleh karena itu, mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan mengancam, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang diancam tersebut.

3) Memaksa

Pengertian memaksa menurut Sianturi adalah:³⁷

Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

³⁶*Ibid*, hlm. 79.

³⁷*Ibid*, hlm 83

Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai secara kasuistik kewajarannya, yaitu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Pokoknya, akibat dari si pemaksa itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

4) Seorang Wanita

Unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP menentukan adanya berbagai definisi wanita antara lain:

- a) Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP).
- b) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP)
- c) Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP).
- d) Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Menurut Sianturi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah:

“Memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan si laki-laki hanya menempel di atas kemaluan si perempuan, tidaklah dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit yang diterapkan dalam Pasal 289 KUHP”.

Menurut A. Zainal Abidin Farid persetubuhan adalah:³⁸

“Tidak diperlukan keduanya air mani laki-laki, tetapi sudah cukup jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan alasan sebagai berikut”:

³⁸*Ibid*, hlm. 119.

1. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki.
2. Bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian bangsa Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat dihukum sebagai pemerkosaan (hanya dihukum sebagai mencoba memperkosa).

Penulis cenderung mengartikan persetubuhan sesuai apa yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin Farid di atas dengan alasan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai keperibadian yang luhur dan suci serta menyunjang nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat. Demikian juga perbuatan bersetubuh dipandang sebagai telah terjadi, jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, dalam hal ini tidak diisyaratkan dengan adanya *ejectioneminis*.

Pasal 285 tidak menghendaki adanya persinggungan alat kelamin saja melainkan timbulnya akibat berupa dimasukkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan si wanita korban. Dengan kata lain, tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan delik material yang baru dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.

Apabila pelaku ternyata tidak berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita korban, misalnya karena korban telah meronta-ronta. Maka pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan tindak pidana yakni melanggar Pasal 53 ayat (1) *jo* pasal 285 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun bagi

pelaku/terdakwa yakni sesuai dengan pidana pokok terberat yang diancam dalam Pasal 285 KUHP dikurangi dengan sepertiganya.

Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan, tentang bilamana suatu perbuatan itu harus dipandang sebagai suatu permulaan tindakan pelaksanaan. Akan tetapi di dalam doktrin yang telah membuat perbedaan antara yang disebut “*voorveridingshandelingen*” atau tindakan persiapan dan “*uitvoeringshandelingen*” atau tindakan pelaksanaan.

Suatu tindakan untuk melakukan kejahatan tidak membuat pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pelaku dapat dipidana yakni jika yang ia lakukan itu ternyata telah melakukan suatu permulaan tindakan pelaksanaan dari kejahatan yang bersangkutan.

Mengenai tindakan pelaksanaan menurut Simons adalah:³⁹

Pada delik-delik materil suatu *begin van uitvoeringshandelingen* itu baru dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni jika pada suatu saat tertentu perbuatan yang dilakukan seorang pelaku itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat, yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tanpa perilakunya itu perlu melakukan sesuatu perbuatan yang lain.

Berdasarkan pendapat Simons tersebut di atas dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan seperti mengunci pintu kamar, mengejar-ngejar korban, menyakiti korban, bahkan juga melepaskan pakaian korban kecuali celana korban, belum dapat di pandang sebagai suatu *begin van uitvoeringshandelingen* (permulaan tindakan pelaksanaan), melainkan baru merupakan *voorveridingshandelingen* (tindakan persiapan), karena untuk menimbulkan akibat berupa dimasukkannya kemaluan pelaku ke dalam kemaluan korban itu,

³⁹Lamintang, *op.cit.*, hlm. 117

pelaku masih perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, setidaknya masih perlu melepaskan celana korban.

Perbuatan menarik lepas pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita dan kemudian meraba-raba alat kelaminnya untuk memaksa wanita tersebut mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya merupakan tindakan-tindakan pelaksanaan dan bukan merupakan tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku itu harus dilakukan di luar perkawinan. Dengan demikian pula setiap perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara wanita yang dilakukan dalam perkawinan itu tidak akan pernah merupakan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan.

D. Jenis Pemerkosaan

Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi bentuknya cukup beragam. Secara teoritis menurut Mulyana W. Kusuma bahwa ada 6 jenis pemerkosaan yakni:⁴⁰

1. *Sadistic Rape* (Pemukosaan Sadistis)

Pemukosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemerkosaan telah menikmati kesenangan erotik bukan melakukan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

⁴⁰Mulyana W. Kusuma, *op.cit.*, hlm. 4

Yakni penganiayaan seksual yang dicirikanseksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononution Rape*

Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan yang superioritas korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Sudektive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh ke senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang mneyangkut seks.

5. *Victim Precipated Rape*

Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Pemerkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang kurang bergantung padanya

secara ekonomis dan sosial. Misalnya, pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Ada begitu banyak kasus pemerkosaan, sering ditemukan kasus pemerkosaan yang di dalamnya terkandung lebih dari satu jenis pemerkosaan. Tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan dari berbagai jenis pemerkosaan tersebut tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku seharusnya juga berbeda-beda. Persoalannya terletak pada proses pembuktian sehingga suatu kasus dapat diidentifikasi secara menyakinkan tergolong satu jenis pemerkosaan, sedangkan kasus lain tergolong jenis pidana lain pula.

E. Karakteristik Perkosaan

Menurut Atmasasmita adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan bukan karena ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*) artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.⁴¹

Adapun kakarakteristik umum tindak pidana perkosaan adalah:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;

⁴¹*Ibid*, hlm. 48.

2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu; anger rape, power rape dan sadistic rape. Dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis;
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
6. Korban perkosaan adalah partisipatif (tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian korban)
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Di antara karakteristik perkosaan diatas, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologinya. Kondisi buruk ini membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologinya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya

partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri. Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah poluler di tengah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Disamping korban tidak mau mengadukan, juga korban tidak segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peranan korban sangat menentukan.

F. Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan bahwa:⁴²

Masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia”.

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya di hadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (*superior*) dan merasa perkasa.

⁴²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, op.cit., hlm. 62.

Diberbagai lingkungan kehidupan masyarakat dan komunitas keluarga, posisi perempuan menjadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaiannya. Tidak menutup kemungkinan, bahwa disuatu keluarga yang kelihatan damai tiba-tiba muncul salah satu anggotanya yang berani dan nekat melakukan perkosaan. Posisi perempuan yang sering tidak berdaya baik sektor domestik maupun publik, di rumah atau dilingkungan keluarga dekat sekalipun, harga diri perempuan juga dapat dilanggar dan dilecehkan oleh anggota (unsur) keluarga lainnya (misalnya orang tua memperkosa anaknya sendiri, kakak kandung memperkosa adiknya, paman memperkosa keponakannya).

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga seperti kasus “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada istri ini tidak dikenal atau diatur dalam KUHP kita dan masih menjadi suatu objek diskursus oleh pakar-pakar hukum Islam, tetapi setidaknya hal itu dapat dijadikan tolak ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.

Nursyahbani Kantjasungkana memaparkan, “masalah perkosaan haruslah ditempatkan pada konteks sosial yang lebih luas di mana posisi kaum perempuan dan perilakunya secara sosial didefinisikan dan dikontrol. Sebab, dalam pola relasi seperti inilah perkosaan itu terjadi. Hal ini ditegaskan oleh PBB dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan pada bulan

Desember 1993. Dalam konsideransi (sebagai pertimbangan) deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan ialah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki serta merupakan hambatan bagi kemajuan mereka.

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada Pasal 1 sudah disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Sedangkan Perkosaan pada Pasal 2 yang tercantum dalam deklarasi tersebut dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan perempuan.

Berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang bermodus penganiayaan, perampasan hak-haknya dan penodaan martabat kemanusiaanya. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan itu.

Pelanggaran HAM yang pertama kali atau bermula terjadi pada saat perkosaan tidak hanya berhenti saat itu saja, namun dapat berlangsung dalam kehidupan berikutnya. Pihak korban tidak mendapatkan perlakuan yang

manusiawi, namun diperlakukan sebaliknya, yaitu diposisikan sebagai objek seperti sebuah barang bekas yang tidak bisa dimanfaatkan atau ditempatkan sederajat dalam strata kemanusiaan. Selain itu, soal perkosaan bukan lagi masalah kehormatan atau keperawanan, tetapi lebih pada soal terenggutnya hak asasi seorang perempuan, yakni hak-hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dan manusiawi di muka umum, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi serta sewenang-wenang.

G. Tinjauan Umum Tentang Anak

Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Namun, terkait pemberian definisi anak terdapat perbedaan-perbedaan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum perdata(KUHPperdata)

Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan;

2. Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian

apabila anak terkait dalam perkara pidana selama tindak pidana yang dilakukan perbuatan atau pelanggaran pidana ringan maka hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undan-undang ini tidak memberikan pengertian secara eksplisit yang mengatur batas usia dan pengertian anak. Namun dalam Pasal 153 ayat (5) KUHAP memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun menghadiri sidang;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c undang-undang ini, bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak negara dan anak sipil untuk

dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 undang-undang ini dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Menurut ketentuan dalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (4) menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (4) menentukan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

10. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin;

Hukum adat menentukan ukuran seseorang untuk dikatakan dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.⁴³

Sementara menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasikan pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 (lima belas) tahun seperti yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955.

Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-VII/2010 terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di Kota Majene, Sulawesi barat dengan pertimbangan bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di wilayah tersebut. Adapun tempat Penelitian Tersebut adalah Polrestabes Majene, Pengadilan Negeri Majene, dan Lembaga Pemasyarakatan Majene.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi lapangan

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak (pelaku) dan instansi yang terkait.

b. Dokumentasi

Cara mendapatkan data yang sudah ada dan di dokumentasikan pada instansi yang terkait.

c. Observasi

Dilakukan kunjungan dan pengamatan langsung pada lokasi penelitian.

Pada penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di Kota Mejene, Sulawesi Barat.

D. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data yang diperoleh dari primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Perkembangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.

Kabupaten Majene memiliki luas Wilayah 947,84 km² dan berpenduduk sebanyak 132.825 jiwa serta Kabupaten Majene terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammero'do Sendana, Malunda, dan Ulumanda, yang meliputi 40 Desa dan Kelurahan. Mayoritas penduduk kabupaten Majene merupakan suku Mandar.

Kejahatan merupakan problema manusia yang terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Bentuk – bentuk kejahatan yang terjadi beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti di Kota-kota besar di Indonesia jumlah kejahatan kekerasan, asusila, dan pemerkosaan terhadap Anak mengalami peningkatan dimana pelaku kejahatan tersebut merupakan orang terdekat korban seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek, kekasih korban, bahkan dari Oknum Annggota Polisi dan Oknum Satpol PP sendiri.

Seperti halnya dengan daerah atau kota lainnya di Indonesia khususnya di Kabupaten Majene tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi fenomena sosial khususnya tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan serta meresahkan warga masyarakat Majene itu sendiri.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan kekerasan, asusila dan pemerkosaan terhadap Anak di Kabupaten Majene, maka kejahatan dapat diketahui mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dilihat pada angka-angka statistik yang diperoleh dari pihak kepolisian maupun dari pihak-pihak yang terkait.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui jumlah kejahatan pemerkosaan Anak yang terjadi di Kabupaten Majene peneliti mengambil data tiga tahun terakhir Mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di Polres Majene. Adapun jumlah Kejahatan pemerkosaan Anak yang dilaporkan dan diadukan di Kantor Kepolisian Polres Majene dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tercatat sebanyak 10 kasus. Penulis telah menguraikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Kasus Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene

No	Tahun	Tindak pidana pemerkosaan Anak
1.	2012	5 (kasus)
2.	2013	3 (kasus)
3.	2014	2 (kasus)
	Jumlah	10 (kasus)

Sumber data : Polres Majene, Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa jumlah tindak pidana pemerkosaan yang paling banyak terjadi yaitu pada tahun 2012 terdapat 5 kasus, pada tahun 2013 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2014 terdapat 2 kasus. Selain itu, jumlah kasus pemerkosaan di Kabupaten Majene dari tahun 2012 sampai

dengan tahun 2014 mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2012 terdapat 5 kasus, tahun 2013 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2014 hanya terdapat 2 kasus saja.

Menurut hemat penulis penurunan jumlah tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Majene tidak terlepas dari upaya pihak Kepolisian Polres Majene dalam menindaklanjuti dan memproses kasus-kasus pemerkosaan yang diadukan oleh Masyarakat.

Setelah adanya pelaporan dan aduan dari masyarakat dan korban pemerkosaan maka kepolisian berkewajiban untuk menindaklanjuti dan memproses tindak pidana tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mengetahui sejauh mana pihak kepolisian dalam hal ini Unit PPA Sat. Reskrim Polres Majene menindaklanjuti pelaporan dan aduan kasus pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene akan penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Data penanganan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak yang ditangani oleh Unit PPA Sat. Reskrim Polres Majene dan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majene
Tahun 2012-2014

No	Tahun	Kasus diadukan	Kasus ditangani/diproses	Dilimpahkan ke Kejaksaan
1	2012	5	5	4
2	2013	3	3	2
3	2014	2	2	2
	Jumlah	10	10	8

Sumber data : Polres Majene, Tahun 2015

Dengan melihat jumlah kasus pemerkosaan Anak pada tabel di atas Korban yang mengadukan ke Polres Majene sebanyak 10 kasus, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2012 terdapat 5 kasus yang diadukan dan 5 kasus yang ditangani serta hanya 4 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majene. Selanjutnya pada tahun 2013 pemerkosaan Anak mengalami jumlah penurunan kasus, hanya terdapat 3 kasus dan yang ditangani untuk diproses oleh Unit PPA Sat.Reskrim Polres Majene sebanyak 3 kasus kemudian yang dilimpahkan ke Kejaksaan hanya 2 kasus. selanjutnya pada tahun 2014 hanya terdapat 2 kasus saja yang diadukan dan kedua kasus tersebut ditangani serta dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majene untuk dilakukan penuntutan.

Berdasarkan data tabel diatas terdapat perbedaan jumlah kasus yang diadukan dan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majene. Menurut Penulis perbedaan jumlah kasus yang diadukan dan yang dilimpahkan ke Kejaksaan disebabkan oleh adanya penyelesaian kasus dengan cara kekeluargaan atau perdamaian antara korban dan pelaku sehingga tidak semua laporan ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Unit PPA Sat. Reskrim Polres Majene.

Selanjutnya pendapat penulis diatas di dukung oleh pernyataan AIPTU. Franky Sari Bulan (Kanit PPA) wawancara pada tanggal 13 januari 2015 pukul 10.00 WITA yang menyatakan bahwa hal lain yang menyebabkan tidak semua kasus pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Majene karena:

1. Pada tahun 2012 terdapat kasus pemerkosaan dengan Laporan Polisi (LP/20/I/2012,SUL-SEL/RES MJN/SKPT,Tgl 23 Januari 2012), dengan uraian kasus pelaku menyetubuhi korban sebanyak 5 (lima) kali hingga hamil. Setelah adanya pengaduan dari keluarga korban maka polisi memproses dan melakukan penahanan kepada pelaku, dalam proses penyidikan antara keluarga korban dan pelaku menempuh penyelesaian dengan jalur kekeluargaan atau secara damai sehingga kasusnya tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majene.
2. Pada tahun 2013 terdapat kasus dengan laporan Polisi (LP/172/XI///2013,SUL-SEL/RES MJN/SPKT,Tgl 28 November 2013), usia pelaku 16 Tahun dan usia Korban 14, dengan uraian kasus Pelaku menyetubuhi Korban sebanyak 6 (enam) kali. Dalam proses penyidikan keluarga korban dan pelaku sepakat untuk menempuk penyelesaian secara adat dan kekeluargaan dengan pertimbangan keduanya masih kategori Anak sehingga keduanya di nikahkan dan proses perkara tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majene.

AIPTU. Franky Sari Bulan menambahkan bahwa setiap kasus pemerkosaan yang diadukan dan dilaporkan tidak serta merta langsung dilakukan penuntutan oleh penyidik, akan tetapi dilakukan pertemuan antara keluarga korban dan pelaku jika keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan maka Polisi memfasilitasi sebagai mediatornya. Selain itu, masyarakat suku Mandar pada umumnya untuk kasus-kasus pemerkosaan menganggap bahwa perilaku tersebut berkaitan dengan aib keluarga sehingga

ketika korban dan pelaku terikat sebuah hubungan asmara (pacaran) maka jalan yang ditempuh yaitu menikahkan korban dan pelaku, serta menyelesaikan secara adat dengan sistem denda. Sistem adat yang berlaku juga masih kental dan tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat.

Berikut adalah data umum penanganan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak di Kabupaten Majene Wilayah Polres Majene akan di uraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Data Umum Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene
Unit PPA Sat. Reskrim Polres Majene
Tahun 2012-2014

No	Laporan polisi	Pekerjaan Pelaku	Uraian Kasus	Usia Korban	Usian Pelaku
1.	LP/20/I/2012,SUL-SEL/RES MJN/SKPT,Tgl 23 Januari 2012	Tidak Ada	Pelaku menyetubuhi Korban	15 Tahun	25 Tahun
2.	LP/56/III/2012,SUL-SEL/RES MJN/SKPT, Tgl 10 April 2012	Swasta	Pelaku menyetubuhi Korban yaitu Anak tirinya sendiri dengan secara paksa didalam kamar	16 Tahun	42 Tahun
3.	LP/113/VI/2012,SU L-SEL/RES MJN/SPKT,Tgl 09 Juni 2012	Nelayan	Pelaku menyetubuhi Korban sebanyak 5(lima) kali hingga hamil	17 Tahun	24 Tahun
4.	LP/172/IX/2012,SU L-SEL/RES MJN/SPKT,Tgl 30 September 2012	Nelayan	Pelaku menyetubuhi Korban	14 Tahun	22 Tahun
5.	LP/200/XI/2012 SUL-SEL/RES MJN/SPKT,Tgl 29 November 2012	Supir Mobil	Pelaku menyetubuhi Korban	17 Tahun	27 Tahun
6.	LP/71/V/2013,SUL-SEL/RES MJN/SPKT,Tgl 10	Swasta	Pelaku menyetubuhi Korban dengan secara paksa dalam kamar	14 Tahun	42 Tahun

	Mei 2013				
7.	LP/75/V/2013,SUL-SEL/RES MJN/SPKT Tgl 17 Mei 2013	Tukang Becak	Pelaku menyetubuhi Anak tirinya selaku Korban	17 Tahun	65 Tahun
8.	LP/172/XI///2013,S UL-SEL/RES MJN/SPKT,Tgl 28 November 2013	Pelajar	Pelaku menyetubuhi Korban sebanyak 6 (enam) kali	14 Tahun	16 Tahun
9.	LP/132/VIII/2014, SUL-SEL/RES MJN/SPKT,Tgl 28 Agustus 2014	Honoror Satpol PP	Pelaku Menyetubuhi Korban	15 Tahun	33 Tahun
10.	LP/133/VIII/2014,S UL-SEL RES MJN/SPKT,Tgl 28 Agustus 2014	Honoror Satpol PP	Pelaku menyetubuhi Korban	15 Tahun	34 Tahun

Sumber data : Polres Majene, Tahun 2015

Tabel diatas menjelaskan mengenai Uraian Kasus pemerkosaan Anak, Usia Pelaku dan Korban, dan Pekerjaan Pelaku. Selanjutnya penulis akan memaparkan secara rinci sebagai berikut:

Pada tahun 2012 dengan (LP/56/III/2012,SUL-SEL/RES MJN/SKPT, Tgl 10 April 2012) dan tahun 2013 dengan (LP/75/V/2013,SUL-SEL/RES MJN/SPKT Tgl 17 Mei 2013) terdapat 2 (dua) kasus pemerkosaan dimana pelaku tindak tindak pidana pemerkosaan tersebut merupakan ayah tiri korban sendiri. Menurut AKP. Jubaidi S.H, (Kasat Reskrim) pemerkosaan yang terjadi yang dilakukan oleh ayah tiri korban disebabkan oleh adanya kesempatan dan seringnya korban dan pelaku hanya berdua di rumah karena ibu korban sibuk bekerja diluar dan ada juga yang menjadi TKI di Malaysia.

Anak yang menjadi korban dan pelaku pemerkosaan berusia 14 Tahun sampai dengan 17 tahun. Hal ini akan penulis rincikan sebagai berikut; Anak menjadi korban pemerkosaan yang berusia 14 tahun sebanyak 2 orang dan satu

orang sebagai pelaku, korban yang berusia 15 tahun sebanyak 3 orang, dan korban yang berumur 16 tahun hanya 1 orang serta korban yang berumur 17 tahun sebanyak 3 orang.

Pada Tahun 2014 terjadi 2 (dua) kasus pemerkosaan dimana kedua pelaku berprofesi sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Majene.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene wilayah Hukum Polres Majene

Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu permasalahan, dilakukan pencarian data mengenai latar belakang terjadinya permasalahan itu sendiri . Berdasarkan data yang penulis peroleh dari instansi penegak hukum dalam hal ini Unit PPA Sat. Reskrim Polres Majene, maka diketahui bahwa jumlah tindak pidana Pemerkosaan Anak yang terjadi mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 10 (sepuluh) kasus.

Maka dari itu, perlu diketahui mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan Anak di kabupaten Majene. Dalam hal ini penulis akan mengkaji faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara terhadap pihak terkait dalam hal ini Kanit PPA dan Kasat Reskrim.

Menurut AKP. Jubaidi S.H, (Kasat Reskrim) dan AIPTU. Franky Sari Bulan (Kanit PPA) wawancara pada tanggal 13 januari 2015s pukul 10.00

WITA, adapun faktor-faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene yaitu faktor Lingkungan, keluarga, Pergaulan yang bebas, seksualitas, situs porno, minuman beralkohol dan lainnya.

Faktor-faktor tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seorang anak atau anggota keluarga. Dalam keluarga seseorang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. Pengalaman-pengalaman atau didikan orang tua sangat mempengaruhi cara-cara bertingkah laku seorang anak di lingkungan masyarakat. Kebebasan yang diberikan oleh orang tua dan kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya juga dapat menimbulkan ancaman kejahatan termasuk kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri korban sendiri hal ini terjadi pada Desy 14 Tahun dan Rasty 16 Tahun. Ayah sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi keluarganya justru melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anaknya. Selain itu, salah satu penyebab pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri korban karena adanya kesempatan sehingga pelaku dengan mudahnya mewujudkan niat jahatnya hal ini dikarenakan ibu korban sibuk bekerja di luar rumah dan juga yang menjadi TKI di Malaysia sehingga antara korban dan pelaku hanya tinggal berdua dirumah.

2. Pergaulan yang bebas

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah keluarga dimana seseorang berpijak sebagai makhluk sosial. Di dalam masyarakat, seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang menaati dan menghormati hukum dan pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menghormati atau menaati hukum. Individu banyak belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya yang memberinya berbagai pengalaman belajar, dengan tujuan memenuhi berbagai kebutuhannya. Pengalaman belajar itu bisa berupa pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Lingkungan pergaulan yang bebas akan memudahkan seseorang bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa memikirkan akibatnya. Menurut AIPTU. Frangky Sari Bulan (Kani PPA) kebiasaan Anak dan remaja pada malam hari nongkrong atau pacaran di taman Kota, sehingga memicu terjadinya kejahatan pemerkosaan hal ini disebabkan suasana taman yang gelap sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mewujudkan niatnya. Selain itu, kebiasaan Anak yang meniru gaya pacaran remaja atau dewasa sehingga memicu hasrat ingin mencoba perbuatan tersebut.

3. Faktor Seksualitas

Faktor seksualitas penulis artikan sebagai hasrat dan nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Menurut AKP. Jubaidi S.H, (Kasat Reskrim) faktor seksualitas juga mempengaruhi terjadinya pemerkosaan hal ini disebabkan dorongan atau hasrat dari pelaku sendiri untuk

melakukan hubungan seks atau ingin coba-coba kasus ini terjadi pada pasangan yang awalnya menjalin hubungan asmara/pacaran sehingga terdorong untuk melakukan hubungan pada pasangannya. Faktor seksualitas lainnya yaitu hubungan dengan pasangan/istrinya tidak pernah tersalurkan (terpendam) sehingga dengan adanya kesempatan pelaku menyetubuhi anak tirinya.

4. Pengaruh Teknologi/ Situs Porno

Pengaruh teknologi/media elektronik terhadap kejahatan pemerkosaan Anak di Majene sangat besar. media elektronik adalah salah satu alat komunikasi yang selalu mengalami perkembangan zaman. Handphone yang awalnya hanya diperuntukan untuk berkomunikasi saja seiring perkembangan pada saat ini handphone tidak terbatas hanya sebagai alat untuk berkomunikasi semata akan tetapi di dalamnya dilengkapi berbagai aplikasi seperti pemutar musik, video dan sebagainya. Sehingga dengan kelengkapan aplikasi yang ada sangat memudahkan penggunaannya untuk menyimpan video termasuk video porno atau gambar-gambar porno lainnya. Menurut AKP. Jubaidi S.H, (Kasat Reskrim) Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap kejahatan pemerkosaan di Kabupaten Majene hal ini dituturkan bahwa para Anak atau remaja dengan mudah mengakses video porno melalui internet maupun telepon seluler. Sehingga dengan demikian karena keseringan menonton video porno dan gambar-gambar yang mengandung unsur porno akibatnya mereka mudah terangsang dan tidak mampu

mengendalikan hawa nafsunya sehingga memicu dorongan atau hasrat pelaku untuk melakukan juga semakin tinggi karena pengaruh dari sering menonton film porno.

5. Minuman beralkohol

Selain faktor di atas minuman beralkohol juga mempengaruhi terjadinya pemerkosaan di kabupaten Majene. Dalam keadaan mabuk biasa pelaku memaksa pacar atau korban untuk melakukan hubungan persetubuhan ketika korban menolak maka timbul unsur kekerasan atau paksaan.

Adapun faktor lainnya sesuai hasil wawancara terhadap pelaku menurut penuturan Hasanuddin Alias Hasan, (Tahanan Polres Majene) pada awalnya mereka menjalin hubungan asmara serta melakukan hubungan atas dasar suka tanpa ada paksaan. Akan tetapi, dari pihak keluarga perempuan tidak menerima perbuatan pelaku setelah anaknya menceritakan kronologi kejadiannya sehingga dilaporkan kepada kepolisian dengan tuduhan pemerkosaan.

Menurut AIPTU. Franky Sari Bulan (Kanit PPA) sebagian besar kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah Polres Majene pada awalnya antara korban dan pelaku saling mengenal dekat dan menjalin hubungan asmara/pacaran karena adanya anggapan bahwa perempuan (korban) merupakan wanita nakal sehingga pelaku terdorong untuk menjalin hubungan dan melampiaskan niatnya.

AKP. Jubaidi S.H, (Kasat Reskrim) menambahkan bahwa cara berpakaian para Anak atau Remaja yang sering menggunakan celana pendek dan baju yang ketat ketika berkumpul di taman kota juga memicu terjadinya kasus pemerkosaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa pelaku kejahatan pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Majene disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, adanya hubungan spesial yang terjadi antara korban dan pelaku sehingga mendorong dan memberi kesempatan melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang, tidak ketatnya pengawasan dari orang tua sehingga dengan mudahnya Anak menjalin hubungan pacaran, pengaruh seksualitas itu sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku maupun korban khususnya kasus yang terjadi pada anak yang pacaran serta adanya pengaruh minuman beralkohol sehingga pelaku dalam keadaan tidak sadar seutuhnya sehingga tidak mampu berpikir secara rasional dan dengan hal ini membuatnya melakukan perbuatan jahatnya.

C. Upaya Penanggulangan kejahatan Pemerkosaan Anak Kabupaten Majene.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan merupakan masalah aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk kejahatan beraneka ragam sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut amat beraneka ragam. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah kejahatan pemerkosaan terhadap Anak

dimana para pelaku kejahatan pemerkosaan merupakan keluarga terdekat korban baik kakek,ayah kandung/tiri, pacar, atau bahkan pelakukanya merupakan oknum anggota satuan polisi pamong praja. Sehingga dengan demikian diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus pemerkosaan.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan pemerkosaan di Kabupaten Majene polres Majene melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah kejahatan pemerkosaan di Kabupaten Majene. Dalam upaya pencegahan ini juga kepolisian melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Menurut keterangan AKP. Jubaidi S.H, (Kasat Reskrim) dan AIPU. Franky Sari Bulan (Kanit PPA) Wilayah Polres Majene, penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

- b. Mengadakan penyuluhan Hukum pada saat kegiatan jumat di masjid untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan keluarga dan Anak dalam masyarakat
- c. Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke tiap-tiap SMA yang ada di Kabupaten Majene dengan tema bahaya dampak negatif seks bebas.
- d. Memberi peringatan kepada pemilik warnet untuk memblokir situs-situs porno yang biasa di akses para pelajar.
- e. Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku perkosaan.

2. Upaya Represif

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Majene juga melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus kejahatan pemerkosaan terhadap Anak. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif.

Dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan Anak secara Represif, dari hasil wawancara dengan AKP. Jubaidi S.H, dan AIPTU. Franky Sari Bulan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan dari korban pemerkosaan kepolisian langsung mengadakan penangkapan, pemeriksaan terhadap

tersangka atau menyita barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyelidikan perkara dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan.

- b. Melakukan patroli di malam hari di taman Kota yang merupakan tempat para Anak dan Remaja pacaran.
- c. Menindaklanjuti remaja yang kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum dengan cara membawa ke kantor polisi kemudian memanggil kedua orang tuannya.
- d. Melakukan atau menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan pemerkosaan Anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut AIPU. Franky Sari Bulan (Kanit PPA) tidak semua laporan kasus pemerkosaan yang diterima dilakukan penahanan terhadap pelaku dan dilimpahkan ke Pengadilan. Kerena, sebagian kasus pemerkosaan di selesaikan secara kekeluargaan (dinikahkan) dan kedua orang tuanya sepakat serta antara pelaku dan korban pemerkosaan masih masuk dalam kategori Anak. Karena sebagian masyarakat masih menganut sistem adat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang berpengaruh dalam terjadinya pemerkosaan terhadap Anak di Kabupaten Majene adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.
2. Bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu secara preventif (pencegahan) dan secara Represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA mengenai dampak negatif bahaya seks bebas, Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari di taman Kota yang merupakan tempat Anak dan Remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadi perbuatan asusila dan kejahatan pemerkosaan, serta melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku pemerkosaan Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Guna menghindari kejahatan pemerkosaan yang terjadi pada Anak seharusnya orang tua tidak membiarkan Anaknya keluar pada malam hari lewat dari jam 10 malam serta melakukan pengawasan yang ketat.
2. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Majene agar taman kota yang ada diberi lampu penerang yang memadai sehingga walaupun pada malam hari tidak menimbulkan suasana remang-remang sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan mesum disekitar taman kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid,Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Alam,A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi: Makassar.
- Anwar Adang,Yesmil. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung.
- Bola,Mustafa dan Judhariksawan. 2004. *Pedoman Perkara Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama: Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*.Rajawali Pers: Jakarta.
- Santoso, Topo dan EvaAchjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Sudarsono. 2007.*Pengantar Ilmu Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- W. Kusuma, Mulyana.1988.*Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta.
- Wahid,Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama: Bandung.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT MAJENE
Jl. Jenderal Sudirman No. 75 Majene (91412)



KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SK / 07 / I / 2015 / Reskrim

1. Rujukan :

- a. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Kampus Unhas Tamalanrea Sulsel Nomor : 262 / UN4.6.3/PL.02/2015 tanggal 12 Januari 2015, perihal permohonan izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, di jelaskan benar bahwa :

Nama : S A M I R
Nomor Pokok : B 111 11 396
Program Studi : ILMU HUKUM
Pekerjaan : Mahasiswa
Bagian : Pidana
Alamat : Perumahan Trika Permai Blok. E No. 9 Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Majene degan judul :

**“ TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK
DIKABUPATEN MAJENE SULAWESI BARAT (TAHUN 2012 – 2014) ”**

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Majene
Pada tanggal : 14 Januari 2015

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MAJENE
KEPALA SATUAN RESKRIM**



Tembusan :

1. Kapolres Majene
2. Dekan Fak.Hukum Unhas Makassar

J U B A N D I, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63100779